

# KEBIJAKAN PENGADAAN MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk



## Latar Belakang :

Kemitraan yang didasarkan pada pengadaan yang berkelanjutan akan membantu memperkuat rantai pasokan dan bisnis Perusahaan di dalamnya. Kemitraan ini membantu Perusahaan mengurangi risiko dan membangun kepercayaan di antara para pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (KPMKSB) untuk memperkuat komitmen Perusahaan dalam bekerja sama dengan para pemasok secara jangka panjang, berkesinambungan dan sukses bagi semua pihak. Kebijakan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pencapaian tujuan bisnis Perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi jalannya rantai pasokan Perusahaan serta mengurangi dampak lingkungan.

Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan mencakup seperangkat Persyaratan Wajib yang harus dipenuhi semua pemasok agar bisa berbisnis dengan Perusahaan. Di luar itu, Perusahaan mendorong para pemasok agar berpindah dari pelaksanaan kepatuhan terhadap persyaratan wajib Perusahaan, ke Praktik yang Baik, dan selanjutnya ke Praktik Terbaik. Perusahaan berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pemasok dalam usaha melakukan perbaikan secara terus menerus.

## Tujuan :

Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan bertujuan untuk mendorong perubahan yang dibutuhkan dalam rantai pasokan kelapa sawit Perusahaan. Secara khusus, dalam hal penggunaan lahan dan perlindungan hutan yang lebih efisien, serta meningkatkan dampak sosial yang positif dengan fokus pada penyertaan petani kecil untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pendapatan mereka.

## Cakupan :

Kebijakan ini berlaku untuk semua minyak kelapa sawit yang dibeli oleh Perusahaan, termasuk TBS, minyak sawit mentah, inti sawit, minyak inti sawit dan turunannya. Kebijakan ini berlaku di seluruh kegiatan operasional Perusahaan, termasuk investasi Perusahaan di perkebunan dan penyulingan, dan untuk semua pemasok dan seluruh kegiatan operasi mereka, termasuk pedagang dan pihak ketiga mereka. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong transformasi pasar yang berkelanjutan, melalui kerjasama dengan pemasok utama, pemerintah, LSM dan industri yang lebih luas dalam penerapan Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan.

# KEBIJAKAN PENGADAAN MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk



## Prinsip untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan :

Landasan Kebijakan ini adalah seperangkat Prinsip untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan. Hal ini dirancang untuk membangun Prinsip dan Kriteria berdasarkan standar Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO) RSPO serta mematuhi semua undang-undang dan konvensi nasional dan internasional yang relevan. Perusahaan berkomitmen untuk mendorong maju penerapan ISPO dan RSPO serta berkomitmen terhadap persyaratan yang melampaui Prinsip dan Kriteria ISPO dan RSPO saat ini:

### 1. Tidak Ada Deforestasi

- a. Tidak ada pembangunan di hutan Stok Karbon Tinggi (SKT)<sup>1</sup>
- b. Tidak ada pembangunan di area ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
- c. Tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan baru, penanaman kembali ataupun pengembangan lainnya.
- d. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada seluruh praktek operasional.

### 2. Tidak Ada Pembangunan di Lahan gambut

- a. Tidak ada pembangunan baru pada lahan gambut terlepas dari kedalaman tanah.
- b. Menerapkan praktik pengelolaan terbaik pada perkebunan yang sudah ada di atas lahan gambut.

### 3. Tidak Ada Eksploitasi Orang atau Masyarakat

- a. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Mengakui hak pekerja, termasuk pekerja kontrak, pekerja sementara dan pekerja asing.
- c. Memfasilitasi masuknya petani kecil ke dalam rantai pasokan Perusahaan.
- d. Menghormati hak-hak warga asli dan komunitas lokal dengan memberi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- e. Menyelesaikan setiap keluhan, pengaduan dan konflik secara terbuka, transparan dan proses yang konsultatif.
- f. Membatasi penggunaan pestisida dalam rangka melindungi pekerja, komunitas lokal dan lingkungan dari paparan kimia berbahaya.

### 4. Transparansi

- a. Mendorong rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan.
- b. Mendukung pelaporan kepada Perusahaan tentang pelanggaran atas Kebijakan Berkelanjutan.

<sup>1</sup> Sesuai yang ditentukan dalam metodologi yang didefinisikan oleh High Carbon Stock Approach Steering Group (The HCS Approach V2 Toolkit), termasuk setiap standar yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang

**KEBIJAKAN PENGADAAN MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk**



**Pelaksanaan Rencana Kerja :**

**1. Persyaratan pemasok**

Perusahaan mempersyaratkan pemasok dan pihak ketiga untuk memverifikasi bahwa minyak sawit yang mereka suplai ke Perusahaan memenuhi 4 prinsip tersebut diatas. Kepatuhan terhadap Prinsip & Kriteria berdasarkan standar ISPO dan RSPO, diterima sebagai bentuk verifikasi kepatuhan dengan Kebijakan ini. Dalam hal Perusahaan mengidentifikasi daerah Pengadaan berisiko tinggi, verifikasi oleh pihak ketiga akan diperlukan. Hal ini berarti Perusahaan membutuhkan:

- a. Kebijakan Pengadaan yang dimiliki oleh pemasok selaras dengan, dan/atau menandatangani komitmen terhadap Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan yang dimiliki Perusahaan.
- b. Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan dan prinsip-prinsip memberi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) selama proses pemetaan tanah sebelum pembangunan lahan baru; dan
- c. Keanggotaan RSPO atau yang setara dan untuk semua pengembangan baru agar mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO atau yang setara; dan
- d. Untuk pemasok utama, keterlibatan aktif dalam pendekatan mereka untuk mematuhi Kebijakan Pengadaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di seluruh kegiatan operasi mereka dan mekanisme mereka untuk memenuhi target Perusahaan, termasuk volume bersertifikat.
- e. Pemasok hulu diharuskan memberikan verifikasi pihak ketiga yang independen bahwa minyak sawit yang dipasok ke Perusahaan mematuhi Kebijakan Pengadaan Kelapa Sawit Berkelanjutan jika Pengadaan tersebut dianggap berisiko tinggi.

**2. Penelusuran Untuk Mengetahui Pengadaan**

- a. Perusahaan berkomitmen terhadap ketertelusuran 100% untuk semua minyak kelapa sawit mentah dan turunannya yang dibeli Perusahaan. Ketertelusuran didefinisikan sebagai kemampuan untuk menelusuri kembali daerah tangkapan yang diketahui yang melekat pada pabrik, termasuk petani plasma dan petani mandiri.
- b. Lokasi pabrik adalah tempat dimana buah kelapa sawit diproses dan juga lokasi perkebunan kelapa sawit berada. Sebagai buah yang sangat mudah rusak, tandan buah segar harus diproses dalam waktu 24 jam setelah panen, dimana perusahaan memperkirakan batas Pengadaan perkebunan sampai radius 50 km di sekitar pabrik. Oleh karena itu, menganalisis area yang berada di sekitar pabrik dapat mengungkapkan informasi yang berguna mengenai praktik pengelolaan perkebunan yang termasuk dalam area Pengadaannya, termasuk dari perkebunan pihak ketiga, dan petani kecil terkait dan mandiri.

**KEBIJAKAN PENGADAAN MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk**



**3. Penilaian risiko dan verifikasi**

- a. Indeks risiko diterapkan terhadap faktor faktor lingkungan dan sosial : (i) tingkat keparahan kebakaran, (ii) luasnya hutan, (iii) penggundulan hutan baru-baru ini, (iv) gambut, (v) eksploitasi dan (vi) keseluruhan risiko di antara faktor-faktor ini.
- b. Jika pabrik dan daerah tangkapan di sekitarnya dianggap berisiko tinggi, diperlukan verifikasi langsung oleh pihak ketiga yang independen. Proses pengaduan akan mulai berlaku saat ketidakpatuhan pemasok diidentifikasi.

**4. Petani kecil**

- a. Tindakan untuk mendorong dampak positif bagi petani kecil harus disertakan dalam keterlibatan pemasok utama.
- b. Strategi petani kecil Perusahaan akan melengkapi pelaksanaan Kebijakan ini.

**Kepatuhan dan Keluhan :**

Perusahaan akan transparan didalam memberikan informasi untuk publik setiap tahunnya terkait laporan kemajuan kinerja operasional Perusahaan, termasuk tindakan yang direncanakan untuk pelaksanaan Kebijakan ini, yang didukung oleh lembaga penjamin independen.

Perusahaan berkomitmen melakukan penanganan yang bertanggung jawab atas semua keluhan atas pelanggaran terhadap Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan Perusahaan. Prosedur penanganan keluhan Perusahaan menetapkan prosedur untuk menangani tuduhan ketidakpatuhan pemasok terhadap Kebijakan Pengadaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Pendekatan Perusahaan adalah selalu terlibat aktif dengan pemasok Perusahaan jika keluhan diajukan terhadap mereka, dan bila memungkinkan, untuk membantu mereka mengatasi kelemahan dalam kebijakan atau praktik mereka. Perusahaan akan menangani pelanggaran yang terbukti serius oleh pemasok dan di mana pemasok menolak untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, Perusahaan akan mengambil langkah yang tepat untuk menangani hal ini dengan cara menjunjung tinggi komitmen terhadap Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Jakarta, 01 Mei 2018

**Bayu Irianto**  
Direktur Utama